

BAB II

SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA BARU

Pada bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana Sudan Selatan sebagai negara baru. Sudan Selatan memiliki berbagai rintangan untuk bisa menjadi negara yang independen seperti saat ini. Perang sipil yang berlangsung selama beberapa dekade menjadi hambatan terbesar Sudan Selatan dalam meraih kemerdekaannya. Hingga akhirnya Sudan Selatan mampu membuktikan kepada masyarakat internasional dengan mendeklarasikan kemerdekaan pada Juli 2011 dan menjadi negara dengan sebutan Republik Sudan Selatan. Selama proses transisi menuju negara berdaulat, Sudan Selatan sebelumnya merupakan negara semi-otonom yang mengalami pergantian pemimpin. Paska pergantian pemimpin, pemerintah Sudan Selatan mengalami pragmatisme hingga memutuskan untuk bergabung dengan World Bank Group. Di sini penulis juga akan menjabarkan tentang sejarah World Bank Group sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan, beserta program-program yang dijalankannya.

A. Sejarah Sudan Selatan

1. Perang Sipil I (1955-1972)

Sudan merupakan negara terbesar di Benua Afrika, hingga pada tahun 2011 Sudan pecah menjadi dua (2) negara merdeka yang berdiri sendiri, yaitu Sudan Utara yang secara resmi disebut Republik Sudan, dengan ibukota Khartoum dan mayoritas penduduk Etnis Arab; dan Sudan Selatan yang memiliki nama resmi Republik Sudan Selatan, memiliki ibukota di Juba dan mayoritas penduduk Etnis Afrika asli (Nations Online, 2018). Sudan Selatan terbagi menjadi sepuluh (10) negara bagian yang sebelumnya sepuluh negara tersebut merupakan bagian dari negara Sudan (BBC, 2018).

Awalnya, Sudan Selatan merupakan negara bagian dari Sudan Anglo-Mesir, di bawah pemerintahan Inggris dan Mesir yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Sudan ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1956. Akan tetapi, setelah Sudan merdeka terjadi dua kali perang sipil dan berlangsung cukup lama. Setelah Sudan mengalami perang sipil yang pertama, daerah otonomi Sudan bagian selatan dibentuk.

Perang Sipil I terjadi pada tahun 1955-1972, yang juga di kenal sebagai *Anya-Nya Rebellion* atau Pemberontakan Anya-Nya yang dipimpin oleh Joseph Lagu. Perang Sipil muncul karena adanya perselisihan antar etnis. Secara demografi, Sudan memiliki penduduk dengan etnis yang berbeda yaitu Etnis Arab (Muslim) dan Etnis Afrika, yang mana dua etnis tersebut bermukim juga di dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah Sudan bagian Utara dengan mayoritas Etnis Arab dan bagian Selatan dengan mayoritas Etnis Afrika (Suku Anya-Nya). Perselisihan tersebut terjadi karena adanya ketegangan antara penduduk Sudan bagian selatan yaitu suku Anya-Nya yang menganut keyakinan Kristen Animisme melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Khartoum yang dipimpin oleh Etnis Arab. Khartoum sendiri merupakan ibukota Sudan, yang artinya semua kegiatan pemerintahan berpusat di sana. Akan tetapi pemerintah bertindak kurang adil dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. Pemerintah lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap etnis Arab dan lebih cenderung melakukan pembangunan di wilayah utara (CBC News, 2011). Pada tahun 1972, konflik berakhir ditandai dengan perjanjian *Addis Ababa Agreement* yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan pada waktu itu Ja'far Nimeiry dan pemimpin Pemberontak Anya-Nya Joseph Lagu. Perjanjian tersebut memuat tentang pembagian otonomi daerah khusus bagi penduduk Sudan bagian selatan dan para pemberontak (Prajurit Anya-Nya) akan diintegrasikan ke dalam pasukan tantara dan polisi Sudan.

Perjanjian *Addis Ababa Agreement* berakhir hingga tahun 1983, di mana pada saat itu Presiden Ja'far Nimeiry melanggar perjanjian tersebut dengan menghapus daerah otonomi khusus bagi penduduk Sudan bagian selatan dan mulai memberlakukan politik Arabisasi dan Islamisasi di Sudan bagian selatan dengan menerapkan hukum syariah. Hal ini jelas mendapat tentangan dari masyarakat Sudan bagian utara yang menganut sekulerisme. Di samping itu, masyarakat Sudan bagian selatan juga menolak karena dirasa hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinan yang di anut oleh mereka, meskipun 97% penduduk Sudan pada saat itu bergama muslim. Di sisi lain, perlakuan tidak adil oleh pemerintah muncul kembali ketika pemerintah melakukan penambangan minyak dan mineral di daerah Kordofan Selatan dan Nil Biru, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam daerah otonomi penduduk Sudan bagian selatan, akan tetapi hasil tambang minyak tersebut justru digunakan untuk melakukan pembangunan di Sudan bagian utara. Sebelumnya pada tahun 1965, penduduk Sudan bagian selatan dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu. (Cahyanti, 2017) Perlakuan-perlakuan tidak adil semacam ini yang membuat konflik di Sudan muncul kembali.

2. Perang Sipil II (1983-2005)

Perang Sipil II terjadi dengan ditandai munculnya pemberontak *Sudan People Liberation Army* (SPLA). Munculnya SPLA disebabkan oleh sikap Presiden Nimeiry yang semakin beralih untuk menerapkan fundamentalisme Islam untuk mendapatkan dukungan kekuasaan. (Wallace, 2014) Nimeiry juga semakin bertindak diktator terhadap masyarakatnya, dia akan memenjarakan mereka yang berani untuk menentang dan menolak apa yang sudah menjadi kekuasaannya. Masyarakat Sudan bagian selatan sangat kecewa dengan sikap Nimeiry dan pemerintahannya yang bisa di anggap gagal, penuh dengan korupsi, sangat bertindak tidak adil, dan sering melakukan penghinaan terhadap masyarakat

Sudan bagian selatan. Karena hal tersebut, pemberontakan kembali muncul dengan kekejaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Kelompok pemberontak SPLA yang dipimpin oleh Kolonel John Garang de Mabior mulai mengangkat senjatanya untuk melawan pemerintah. Di satu sisi, kubu dari pemerintah telah membentuk pasukan militer di kenal sebagai Janjaweed yang terdiri dari suku Arab Rizeigat, Misseriya, dan Abbala. Janjaweed sengaja dibentuk oleh Mismeiry untuk melawan SPLA, akan tetapi perlawanan tersebut kurang berhasil. Janjaweed pada saat itu hanya mampu menghambat pendistribusian makanan yang mengakibatkan bencana kelaparan di Sudan bagian selatan. Hingga pada tahun 1985 Nimeiry berhasil digulingkan dengan cara kudeta tanpa ada penyelesaian perdamaian dengan SPLA (Foundation, 2015).

Tahun 1989, Letnan Jenderal Omar al-Bashir resmi menjadi Presiden Sudan. Bashir membentuk sebuah gerakan yaitu *Revolutionary Command Council* (RCC) atau yang biasa di kenal dengan Dewan Komando Revolusi untuk Keselamatan Nasional. RCC sendiri berpegang teguh pada *National Islamic Front* (NIF) yang merupakan sebuah partai politik yang berpedoman pada fundamentalisme. Tidak jauh berbeda dengan model kepemimpinan Nimeiry di masa lalu, Bashir juga bertindak secara keras. Presiden Bashir membebaskan milisi Arab untuk melawan orang-orang suku Afrika asli, terutama suku Dinka. Selain itu, pemerintah semakin memperparah keadaan krisis pangan dengan menolak semua bantuan makanan yang datang. Karena bencana tersebut, banyak orang Afrika melarikan diri dan mencari perlindungan hingga ke Ethiopia. Ribuan orang tewas akibat kelaparan dan tidak adanya bantuan dari pemimpin RCC tersebut. Bashir lebih memilih untuk melanjutkan perlawanan dengan SPLA, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Bashir justru memperparah keadaan ekonomi nasional. Pemerintahan Bashir gagal dalam mempertahankan kota-kota di wilayah selatan, dan jatuh ke tangan SPLA. Melihat hal tersebut, pemerintah semakin ingin untuk menghancurkan SPLA

sebagai langkah awal dalam mengambil kebijakan untuk mengislamkan penduduk non-muslim di bagian Selatan. Karena pada saat itu Omar al-Bashir merupakan pemimpin yang menginginkan Sudan menjadi negara Islam. Hukum RRC yang diterapkan oleh Omar al-Bashir hanya mampu bertahan hingga tahun 1993. Pada saat itu, pemerintahan militer yang diterapkan oleh Bashir berhasil diberhentikan dan bertransisi menjadi pemerintahan sipil. Kendati demikian, NIF masih berkuasa dan RRC menunjuk kembali Omar al-Bashir sebagai Presdien pada tahun 1996 (Sikainga, Spaulding, Collins, & Sabr, 2018).

Konflik masih terus berlanjut, hingga pada awal tahun 1990-an John Garang sebagai ketua SPLA mengambil tindakan yang cukup ekstrim dengan menentang kebijakan pemerintah yang hanya berbasis di utara. Hal ini dilakukan tidak lain untuk memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan bagi penduduk selatan. Pada tahun 1993, pemimpin dari Ethiopia, Uganda, dan Kenya sepakat menjadi mediator konflik Sudan utara – selatan dengan berusaha membentuk perjanjian perdamaian dan gencatan senjata antara kedua pihak melalui organisasi *Intergovernment Authority for Development* (IGAD). Kemudian pada tahun 1994, IGAD berusaha mendorong proses perdamaian dengan mengeluarkan Deklarasi Prinsip (*Declaration of Principles*), namun pemerintah Sudan tidak menyetujui hal tersebut dan menolak untuk menandatangani deklarasi tersebut. Pada April 1995, terjadi gencatan senjata yang menyebabkan ribuan penduduk menjadi korban dari pertikaian tersebut ataupun komplikasi dari krisis pangan karena terhambatnya pendistribusian bantuan makanan yang dibutuhkan selama konflik. Karena desakan dari pihak SPLA dan pemerintah Sudan mengalami banyak kekalahan maka deklarasi berhasil ditandatangani pada tahun 1997. Deklarasi tersebut bukan merupakan deklarasi perdamaian perang, akan tetapi sebuah deklarasi yang sengaja dibuat tentang pengakuan Sudan yang merupakan negara multi-etnis. (Nonitehe, 2013)

Tahun 1999, Sudan mulai mengekspor minyak untuk menolong perekonomian negara yang pada saat itu tidak stabil. Ada beberapa kendala yang menghambat kegiatan ekspor minyak, karena cadangan minyak terbanyak ada di wilayah selatan dan perbatasan antara utara-selatan, mengingat kedua kubu tersebut masih terlibat dalam konflik, di samping itu juga kendala transportasi yang kurang memadai. Berbagai perjanjian dan diskusi perdamaian terjadi selama tahun 1990-an hingga awal abad ke-21. Lebih dari 2 juta orang tewas dan 4-5 juta mengungsi sejak perang sipil kedua terjadi pada tahun 1983 (Sikainga, Spaulding, Collins, & Sabr, 2018). Negosiasi perdamaian terus berlanjut hingga pada tahun 2004, kedua belah pihak menandatangani deklarasi yang memuat tentang Perjanjian Perdamaian Komprehensif (*Comprehensive Peace Agreement*).

3. *Comprehensive Peace Agreement (2005)*

Perang sipil berakhir ketika *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang disebut juga sebagai Perjanjian Naivasha dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2005. CPA tersebut ditandatangani oleh pemimpin SPLA John Garang dan Wakil Presiden Sudan Ali Osman Taha di Naivasha, Kenya. Di mana pada saat itu Intergovernment Authority for Development (IGAD) yang merupakan sebuah organisasi regional yang berhasil menjadi mediator karena Sudan merupakan anggotanya. Perjanjian CPA tersebut berisi tentang persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak, yang difasilitasi oleh IGAD. Perjanjian tersebut juga berisi hal-hal lain seperti pembagian otonomi daerah, kekayaan minyak, isu ekonomi, administrasi, hukum Islam dan tindak lanjut mengenai integrasi pasukan militer dari setiap kubu. Masyarakat Sudan bagian selatan dijanjikan enam tahun setelah penandatanganan perjanjian tersebut akan ada kelanjutan mengenai referendum, apakah rakyat Sudan bagian selatan ingin bersatu dengan utara atau memilih untuk merdeka dan menjadi negara independen. Dalam perjanjian

Naivasha tersebut, pasukan militer dari Sudan bagian selatan dan utara tetap menjadi unit militer yang terpisah sebelum adanya integrasi. Langkah awal untuk melakukan integrasi militer yaitu pemerintah menarik pasukan militernya dari wilayah Sudan bagian selatan dalam kurun waktu 2 tahun, sedangkan pihak SPLA diberi kesempatan yang sama untuk menarik pasukan militernya dari wilayah Sudan bagian utara dalam kurun waktu 8 bulan. Integrasi militer ini dilakukan secara bertahap selama 6 tahun sesuai dengan perjanjian (Nonitehe, 2013).

Satu bulan paska penandatanganan CPA, John Garang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter. Paska kematian John Garang, Salva Kiir di angkat menjadi pemimpin wilayah Sudan bagian Selatan (saat ini Sudan Selatan). Salva Kiir merupakan wakil dari John Garang dalam memperjuangkan wilayah selatan. Sebagai pemimpin yang baru, Salva Kiir menegaskan bahwa CPA akan terus dilaksanakan demi masyarakat Sudan bagian selatan. Meskipun John Garang dan Salva Kiir berada dalam satu kubu yang sama, mereka memiliki beberapa pandangan yang berbeda. John Garang lebih menyukai Sudan bersatu tetapi dengan menerapkan otonomi yang lebih kuat di wilayah selatan. John Garang juga mempromosikan ideologi sosialisme yang di anggap relevan untuk wilayah selatan dalam melakukan pembangunan. Sementara Salva Kiir meyakini bahwa kemerdekaan bagi masyarakat wilayah selatan lebih pantas untuk didapatkan (The New York Times, 2005).

Pada tahun 2011, enam tahun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan berbagai persiapan dan perencanaan dilakukan oleh masyarakat Sudan bagian selatan untuk melakukan referendum kemerdekaan. Menurut Komisi Referendum Sudan Selatan (*South Sudan Referndum Commission/SSRC*) mayoritas penduduk Sudan bagian selatan memilih untuk memisahkan diri dari utara. Presiden Omar al-Bashir secara resmi menerima hasil referendum tersebut. Pada tanggal 9 Juli

2011, penduduk Sudan bagian selatan mendapatkan kemerdekaan dan secara resmi menjadi sebuah negara baru yaitu Republik Sudan Selatan. Salva Kiir diangkat menjadi presiden pertama Sudan Selatan dan bertanggung jawab atas negara ini. Sebagai negara baru, Sudan Selatan bergerak dengan cepat menegaskan statusnya sebagai negara independen dengan mengeluarkan mata uang sendiri yaitu Pound Sudan (BBC News, 2011).

B. Pergantian Pemimpin Sudan Selatan

John Garang dilantik menjadi wakil presiden pertama Sudan, untuk melayani di bawah musuh bebuyutannya, yaitu Presiden Al-Bashir, pada 9 Juli 2005 dan menjadi orang selatan dan Kristen pertama yang memegang jabatan tinggi di Sudan. Tiga minggu paska pelantikannya, John Garang tewas dalam kecelakaan helikopter ketika kembali dari perjalanan singkatnya ke Uganda. Salva Kiir kemudian menjadi wakil presiden pertama yang menggantikannya. Kiir merupakan orang selatan dan Kristen kedua yang memegang jabatan penting di Sudan. Salva Kiir populer di kalangan sayap militer SPLA karena kemenangannya di medan perang dan terkenal di kalangan masyarakat karena sifat pro pemisahan yang jelas. Sifat pro pemisahannya disampaikan dengan jelas kepada masyarakat selatan, *“Lebih baik menjadi warga yang bebas di negara yang independen (Sudan Selatan), daripada menjadi warga kelas kedua di negara sendiri (Sudan)”*. (Sudan Face, 2011)



Gambar 2.3 Salva Kiir and John Garang, 1987-88 Pinyado

Sumber: *Courageous Journey*

Perjalanan politik Presiden Salva Kiir sudah di mulai sejak perjuangan pembebasan Sudan Selatan untuk menuju kemerdekaan. Seperti pendahulunya mendiang John Garang, Salva Kiir yang dikenal dengan topi fendra khasnya, merupakan penduduk suku Dinka. Sebelum kepergiannya, John Garang berhasil memimpin selatan ke perjanjian damai atau CPA dengan utara menggunakan gaya yang karismatik dan tidak menimbulkan perlawanan. Kiir yang menjadi tim penasehat penting Garang juga terlibat dalam tahap awal negosiasi CPA 2005 untuk mengakhiri 21 tahun perang. Setelah berhasil dalam negosiasi perjanjian damai, Kiir diangkat menjadi wakil John Garang. Paska kepergian John Garang, Salva Kiir menjadi pengganti dan harus memimpin selatan dengan pedoman CPA yang sudah ditandatangani John Garang sebelumnya. Banyak masyarakat yang meragukan atau pesimis dengan model kepemimpinan Salva Kiir. Mereka mengatakan bahwa dia tidak memiliki kapasitas yang sesuai seperti pendahulunya yang dipandang intelektual dan politis (Onyango, 2011).

Salva Kiir yang di kenal karena kesederhanaannya pada saat itu, mengakui bahwa kakinya tidak cukup besar untuk masuk ke sepatu pendahulunya. Pernyataannya yang berani di perkuat selama pemilihan terakhir tahun 2010, Salva Kiir terpilih kembali dengan 93% suara rakyat sebagai Presiden Sudan Selatan yang semi-otonom. Ini merupakan indikasi bahwa dia tidak lagi tertarik pada Sudan bersatu. Hingga kemerdekaan pada tahun 2011, Salva Kiir resmi dilantik menjadi Presiden Sudan Selatan yang sudah mengambil daerah otonomi secara total dan menjadi negara republik (Sudan Face, 2011).

Ketika Sudan Selatan masih berada di bawah kepemimpinan John Garang, sosialisme mungkin akan diterapkan. Hal tersebut sempat dikemukakan oleh John Garang yang merupakan aktivis paling berpengaruh di Sudan Selatan pada saat itu. Argumen John Garang tentang sosialisme yang pernah disampaikan juga di dukung oleh mayoritas penduduk Sudan yang percaya tentang sosialisme merupakan cara yang cukup tepat untuk memperbaiki pemerataan di Sudan Selatan. Akan tetapi tindakan yang dilakukan John Garang untuk menerapkan sosialisme di Sudan Selatan cukup ekstrim, dia akan melawan dengan menggunakan kekuatan bagi mereka yang menolak idenya dan ingin merebut kepemimpinannya (Moro, Santschi, Gordon, & dkk, 2017).

Melihat definisi di atas, keadaan politik dalam negeri Sudan Selatan bisa dibilang kurang stabil. Paska meninggalnya John Garang hingga mencapai kemerdekaan, Sudan Selatan berada di bawah kepemimpinan Salva Kiir, dalam transisi menuju negara independen negara ini mengalami dilema perpolitikan. Sebagai negara baru Sudan Selatan harus membangun institusi pemerintahan sendiri, sedangkan paham politik yang dulu diterapkan ketika masih bergabung dengan Sudan masih melekat. Untuk merubah hal tersebut tentu tidak mudah, bahkan sistem politik yang tidak

stabil bisa berdampak pada keadaan ekonomi yang ada. Maka dari itu, Sudan Selatan memiliki tantangan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan berfungsi dengan baik. Namun pada faktanya, situasi korupsi justru terjadi di Sudan Selatan (Amdjad, 2013). Kurang berfungsinya sistem pemerintahan dan lemahnya lembaga pemerintahan menyebabkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan demikian, Sudan Selatan di prediksi akan menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintahan yang lemah (Huyen, 2012). Hal ini kemudian menimbulkan pragmatisme Presiden Salva Kiir dalam melaksanakan pembangunan nasional.

C. World Bank Group Sebagai Organisasi Internasional

1. Sejarah Terbentuknya World Bank Group

World Bank Group atau Kelompok Bank Dunia di bentuk pada tahun 1994 dalam *Bretton Wood Monetary Conference*, Bretton Wood, Amerika Serikat. Tujuan awal dibentuknya World Bank adalah untuk mendanai rekonstruksi di negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II. Pinjaman pertama World Bank diberikan kepada Perancis pada tahun 1947 untuk melakukan rekonstruksi paska perang. Seiring berjalannya waktu, para aktor di bawah World Bank mengambil alih peran dukungan rekonstruksi kepada kebutuhan para negara anggotanya di Amerika Latin, Afrika dan Asia (World Bank, 2018).

World Bank Group menaungi lima lembaga internasional yang bersedia memberi pinjaman ke negara-negara yang membutuhkan bantuan dana, terutama bagi negara-negara berkembang. World Bank Group memiliki dua tujuan umum dan utama, yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan berusaha untuk membangun kembali kesejahteraan masyarakat di negara berkembang dengan mendorong pertumbuhan pendapatan yang berada di bawah 40% setiap negara. Lima

lembaga di bawah World Bank Group antara lain : The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank fokus untuk menangani kemiskinan di negara berpendapatan menengah ke bawah; The International Development Association (IDA) fokus untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada negara-negara termiskin di dunia; The International Finance Corporation (IFC) fokus pada sektor swasta seperti membiayai investasi, memobilisasi modal di pasar keuangan internasional, dan menyediakan layanan konsultasi untuk bisnis; kemudian The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) fokus untuk mempromosikan investasi asing langsung ke negara-negara berkembang; dan yang terakhir yaitu The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) fokus pada menyediakan fasilitas internasional untuk menyelesaikan sengketa investasi di suatu negara. (Linkedin, 2017) Saat ini World Bank Group memiliki anggota tetap kurang lebih 188 negara dan bekerja dengan mitra di sektor publik maupun swasta untuk memerangi kemiskinan di seluruh dunia dengan menyediakan pendanaan terhadap berbagai proyek pembangunan global.

Struktur dari World Bank Group mewajibkan penggunaan uang dollar bagi negara-negara anggotanya. Kantor pusat World Bank Group terletak di Washington DC dan memiliki kurang lebih 100 kantor cabang yang tersebar di berbagai dunia. World Bank saat ini memiliki anggota 188 negara dan ada 5 negara yang memiliki kursi tetap (*Big Five*) yaitu Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Akan tetapi Amerika Serikat merupakan anggota sekaligus pemegang terkuat World Bank. Kelima negara tersebut memiliki hak suara (*veto*) terbesar di World Bank. Untuk menjadi anggota World Bank, suatu negara harus bergabung terlebih dahulu dengan International Monetary Fund (IMF), karena ukuran besaran saham yang dipegang oleh suatu negara sama dengan saham yang ada di IMF. Sedangkan besaran

saham yang ada di World Bank dan IMF di ukur dari kemajuan ekonomi suatu negara tersebut.

2. Program-program World Bank Group

Dalam menjalankan tugasnya, World Bank memiliki dua program prioritas yaitu *Maximizing Finance for Development* (MFD) dan *Human Capital Project*. Pertama *Maximizing Finance for Development* (MFD), yaitu merupakan sebuah pendekatan atau cara yang dilakukan oleh World Bank Group secara sistematis memanfaatkan sumber keuangan, keahlian, dan solusi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan negara-negara berkembang. Dalam merangkul *Sustainable Development Goals* (SDGs), banyak negara yang mengalami kesulitan dikarenakan kebutuhan sumber daya yang telah melampaui anggaran nasional negaranya. Dengan demikian, untuk memenuhi tuntutan SDGs, World Bank Group memiliki tantangan untuk menemukan solusi dari segala sumber baik keuangan, inovasi, dan keahlian. World Bank Group melibatkan lembaga-lembaga dibawahnya, seperti IBRD, MIGA, IDA, dan IFC untuk bekerja sama membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakesetaraan demi mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi SDGs diakhir tahun 2015 silam (World Bank Program, 2018).

Program MFD sudah berjalan di beberapa negara berkembang seperti, Kenya, Peru, Vietnam, Indonesia, dll. Kenya misalnya, MFD berhasil menawarkan solusi dengan melibatkan sektor swasta dalam menangani masalah infrastruktur dan layanan sosial melalui program "*Enabling Private-Sector Participation in Infrastructure and Sosial Services*". Kenya sedang mengembangkan program untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur untuk membantu mengatasi kesenjangan. Dalam hal ini, World Bank Group telah menyediakan dana sebesar 90 juta USD untuk memulai program tersebut. Kenya telah

menghadapi defisit pembiayaan infrastruktur yang signifikan yang diperkirakan mencapai 2,1 miliar USD setiap tahunnya, di mana hal ini tentu sangat menghambat pertumbuhan dan proses pembangunan di Kenya. Pengeluaran untuk pembangunan berkelanjutan sendiri hampir 4 miliar USD per tahun hanya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur negara. Sedangkan Kenya masih memiliki hutang publik mencapai 57% dari PDB, defisit ini tidak akan terpenuhi hanya dengan mengandalkan sumber daya negara. Dengan demikian, negara perlu adanya mobilisasi sektor swasta untuk membiayai kebutuhan infrastruktur. World Bank Group telah memperkirakan bahwa dengan peningkatan pembiayaan infrastruktur, maka dapat meningkatkan juga pendapatan per kapita Kenya sebesar tiga poin persentase. Sebelumnya, Kenya pernah memiliki pengalaman sukses di sektor energinya. Dengan pengalaman sukses yang pernah dimilikinya, pemerintah kemudian memobilisasi investasi swasta di bidang infrastruktur (World Bank, 2018).

Kedua yaitu *Human Capital Project*, yang merupakan suatu program yang dirancang oleh World Bank Group untuk meningkatkan sumber daya manusia. Modal manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang menjadi potensi manusia agar membentuk masyarakat yang produktif. Dengan mengembangkan sumber daya manusia, kita dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Tanpa modal manusia negara-negara tidak akan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tidak akan memiliki tenaga kerja yang dipersiapkan untuk pekerjaan yang lebih terampil di masa depan, serta tidak bisa bersaing secara efektif dalam ekonomi global. *Human Capital Project* diharapkan dapat membantu menciptakan ruang politik bagi para pemimpin nasional untuk memprioritaskan investasi di bidang sumber daya manusia. Tujuan daripada *Human Capital Project* itu sendiri adalah kemajuan yang cepat menuju dunia di mana semua anak-anak memiliki pengetahuan dan tingkat gizi yang baik, sehingga di usia yang siap kerja mereka

mampu menjadi manusia yang terampil, sehat, dan produktif. World Bank Group telah mengumumkan *Human Capital Project* pada tahun 2017 dan hingga saat ini program sudah berjalan sukses di berbagai negara di dunia (World Bank, 2017).